



Article Informations  
Corresponding Email:  
aininurelina12@gmail.com

Received: 04/08/2025; Accepted:  
14/09/2025; Published: 15/10/2025

## **KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DALAM MEMPERTAHANKAN POSISINYA DI PASIFIK SELATAN MELALUI PERJANJIAN FALEPILI DENGAN TUVALU TAHUN 2023-2024**

**Aini Nur Elina**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya dinamika geopolitik di Kawasan Pasifik Selatan, terutama kehadiran China yang berpotensi menggeser posisi Australia. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana faktor-faktor dalam proses pengambilan keputusan memengaruhi kebijakan luar negeri Australia terhadap Tuvalu melalui Perjanjian Falepili. Pendekatan yang digunakan adalah *Foreign Policy Decision Making* (FPDM) oleh Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr., yang mencakup tiga faktor utama: lingkungan pengambilan Keputusan (ambiguitas, tekanan waktu, dan risiko), faktor internasional (*deterrence*, aliansi, dan tipe rezim musuh) dan faktor domestik (tekanan publik dan siklus pemilu). Metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan Teknik studi pustaka dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian Falepili merupakan respons Australia terhadap ketidakpastian strategis China, tekanan waktu menjelang pertemuan PIF dan pemilu Tuvalu, serta dinamika domestik seperti tekanan publik atas isu perubahan iklim dan pergantian pemerintah ke Anthony Albanese. Perjanjian ini mencerminkan strategis Australia untuk mempertahankan posisinya di kawasan Pasifik Selatan serta menegaskan komitmennya terhadap solidaritas kawasan.

**Kata Kunci:** kebijakan luar negeri, Australia, Tuvalu, Perjanjian Falepili, Pasifik Selatan

### **Abstract**

*This research is motivated by the increasing geopolitical dynamics in the South Pacific region, particularly China's presence, which has the potential to shift Australia's position. The issue examined is how factors in the decision-making process influence Australia's foreign policy toward Tuvalu through the Falepili Union Treaty. The approach used is Foreign Policy Decision Making (FPDM) by Alex Mintz and Karl DeRouen Jr., which includes three main factors: the decision environment (ambiguity, time pressure, and risk), international factors (deterrence, alliances, and enemy regime type), and domestic factors (public pressure and election cycles). The research method is descriptive qualitative, employing literature review and document analysis techniques. The research findings indicate that the Falepili Union*

*Treaty is Australia's response to China's strategic uncertainty, time pressure ahead of the PIF meeting and Tuvalu's elections, as well as domestic dynamics such as public pressure on climate change issues and the change of government to Anthony Albanese. This agreement reflects Australia's strategic approach to maintaining its position in the South Pacific region and reaffirming its commitment to regional solidarity.*

**Keywords:** *foreign policy, Australia, Tuvalu, Falepili Union Treaty, South Pacific*

## **1. PENDAHULUAN**

Kawasan Pasifik Selatan sendiri merupakan wilayah yang terletak di Samudera Pasifik dan terdiri atas negara-negara dengan kepulauan yang umumnya memiliki wilayah teritorial yang relatif kecil, tingkat pertumbuhan yang rendah, infrastruktur yang masih terbatas, dan pelayanan pemerintahan yang masih belum optimal. (Nadjiha, 2020) Kawasan Pasifik Selatan memiliki nilai yang strategis, meskipun negara-negara di kawasan tersebut menempati wilayah geografis yang serupa, namun posisi mereka tetap penting dalam arena politik persaingan kekuatan besar. (Editorial, 2022).

Kawasan Pasifik Selatan menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks, termasuk meningkatnya pengaruh eksternal seperti, kehadiran China di kawasan. China berusaha untuk meningkatkan keterlibatannya melalui pendekatan diplomatik, ekonomi dan keamanan. Bahkan ketika negara-negara Pasifik Selatan sedang dilanda pandemi *covid-19* China hadir sebagai negara pemberi dalam pinjaman dana. (Barrett & Menon, 2021). China juga melakukan kerja sama keamanan dengan Kepulauan Solomon, yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian keamanan pada April 2022 (Kabutaulaka, 2022).

Menyikapi pengaruh China yang semakin meluas tersebut, Australia sebagai negara yang memiliki kedekatan historis dan terletak berada di dekat kawasan Pasifik Selatan, memandang tantangan regional, termasuk dinamika geopolitik dan isu perubahan iklim, sebagai peluang untuk memperkuat posisinya di kawasan Pasifik Selatan. Sejak Australia berdiri, negara tersebut telah memposisikan diri sebagai aktor utama yang meyebarkan pengaruhnya di wilayah Pasifik Selatan. (Haq & Islam, 2020).

Pandangan ini diperkuat oleh letak geografis Australia yang berbatasan langsung dengan kawasan Pasifik Selatan, sehingga wilayah tersebut dipandang sangat strategis bagi kepentingan nasional Australia. (Tyler, 2022).

Pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Scott Morrison, dimana pertama kali Australia mengadopsi konsep “*Pacific Family*”. (Wallis, 2023). Kerangka ini tidak hanya menjadi simbol pendekatan yang berkelanjutan, namun mencerminkan juga upaya kebijakan luar negeri Australia untuk memperkuat peran dan kedekatannya dengan negara-negara Pasifik Selatan sebagai bagian dari komunitas regional yang memiliki keterikatan erat dengan kepentingan nasionalnya.

Gagasan *Pacific Family* ini juga tidak terlepas dari tradisi kerja sama regional yang telah ada sejak masa kolonial, dimana para pemimpin Pasifik menyadari bahwa kerja sama adalah hal yang sangat penting untuk memperkuat keamanan serta pembangunan regional. Sejak saat itu, negara-negara Pasifik mulai membentuk berbagai organisasi regional untuk negara-negara di kawasan tersebut, salah satunya membuat *Pacific Islands Forum* (PIF). anggota PIF juga berharap jika kehadiran Australia dapat memperkuat posisi mereka di kancah internasional. (Wallis, McNeill, Batley, & Powles, 2023). Sebagai anggota pendiri PIF sejak pembentukannya pada tahun 1971, Australia telah berperan aktif dalam berbagai mekanisme keamanan di kawasan Pasifik Selatan. Australia bahkan menjadi salah satu donor utama dalam bidang keamanan bagi negara-negara Pasifik Selatan. (Moore, 2024). Oleh karena itu, Australia menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam hal pendanaan dan investasi, khususnya dalam bidang pembangunan dan penguatan keamanan di wilayah tersebut. (Poiohia, Moerman, & Perkiss, 2022)

Hubungan Australia dengan wilayah Pasifik Selatan sempat mengalami ketegangan pada tahun 2019. Dimana Perdana Menteri Australia yaitu Scott Morrison dianggap merendahkan serta dinilai

tidak memberikan perhatian serius terhadap isu perubahan iklim, yang merupakan kepentingan utama bagi negara-negara Pasifik. (Lyons, 2019). Namun, ketegangan tersebut mulai mereda sejak Australia berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese pada tahun 2022. Pemerintahan baru ini memperbaharui kebijakan luar negerinya dengan menunjukkan komitmen yang nyata untuk memperbaiki hubungan sekaligus memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik, bahkan para pemimpin Pasifik juga menyambut baik perubahan ini. (Tyler, 2022).

Negara-negara Pasifik Selatan, seperti Kiribati, Nauru, dan Tuvalu menghadapi dampak nyata perubahan iklim terutama kenaikan permukaan laut yang mengancam keberlangsungan hidup negara mereka. (Curtain & Dornan, 2019). Menyadari besarnya ancaman nyata dari perubahan iklim yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik, khususnya Tuvalu, Australia mengambil langkah strategis dengan menandatangani perjanjian Falepili pada tahun 2023 sebagai upaya kebijakan luar negeri Australia sekaligus komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dan menjawab tantangan di kawasan Pasifik Selatan. (Green & Guilfoyle, 2024).

Namun, kekhawatiran Australia terhadap peningkatan pengaruh China di Pasifik bukan hanya semata-mata disebabkan oleh bantuan pembangunan atau kerja sama ekonomi, melainkan karena adanya potensi pergeseran pengakuan hubungan diplomatik negara-negara Pasifik Selatan dari Taiwan kepada China. (Dziedzic, 2024). Pergeseran ini dianggap sebagai ancaman yang serius bagi Australia karena dapat memperkuat posisi China secara Politik.

## **2. PEMBAHASAN**

Kebijakan luar negeri suatu negara tidak hanya diambil secara acak. Malainkan merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Untuk memahami dinamika kebijakan luar negeri

Australia terhadap Tuvalu melalui Perjanjian Falepili, penelitian ini menggunakan pendekatan *Foreign Policy Decision Making* (FPDM) yang dikembangkan oleh Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr dengan fokus pada tiga faktor utama yaitu faktor lingkungan pengambilan Keputusan, faktor internasional, dan faktor domestik.

## **2.1 Faktor Lingkungan Pengambilan Keputusan**

Dalam pendekatan *Foreign Policy Decision Making* (FPDM) yang dikembangkan oleh Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr., lingkungan pengambilan keputusan (*decision environment*) merupakan konteks strategis yang memengaruhi cara negara merespons isu luar negeri. Lingkungan ini mencakup faktor ambiguitas, tekanan waktu, dan risiko yang dapat mendorong negara bertindak cepat dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. (Mintz & DeRouen, 2010)

Dalam konteks kebijakan luar negeri Australia terhadap Tuvalu, lingkungan pengambilan keputusan tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik di kawasan Pasifik Selatan. Secara geografis dan historis, kawasan ini memiliki arti penting bagi Australia karena wilayah ini merupakan bagian dari lingkungan strategis terdekatnya. Stabilitas kawasan ini dipandang sebagai bagian dari keamanan Australia, mengingat keamanan Australia bergantung pada kawasan Pasifik yang stabil. (Moore, 2024). Bahkan dalam dokumen *Defence Strategic Update 2020*, dinyatakan bahwa kawasan Indo-Pasifik berada dalam persaingan strategis yang membuat kawasan ini semakin diperebutkan. (Australia Government Defence, 2020).

Oleh karena itu, pengambilan keputusan terhadap Perjanjian Falepili tidak dapat dilepaskan dari lingkungan strategis yang dihadapi Australia. Kebijakan ini lahir dari interaksi internasional yang kompetitif yang menuntut tindakan negara. tiga elemen yang ditekankan dalam penelitian ini adalah ambiguitas, tekanan waktu (*time pressure*) dan risiko (*risk*).

### **2.1.1 Ambiguitas**

Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr. mendefinisikan ambiguitas sebagai kondisi di mana informasi atau situasi memiliki makna yang banyak atau dapat diartikan dengan cara yang berbeda-beda sehingga menyebabkan kebingungan dalam pengambilan Keputusan. (Mintz & DeRouen, 2010). Sehingga dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, pembuat kebijakan tidak hanya menghadapi pilihan yang sulit, namun harus segera merumuskan respons terhadap ancaman yang belum sepenuhnya dapat diprediksi.

Situasi ambiguitas ini tercermin dalam kebijakan luar negeri Australia terhadap negara-negara Pasifik Selatan, khususnya terkait dengan meningkatnya pengaruh China. Meskipun China belum secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menggantikan posisi Australia sebagai mitra utama bagi negara-negara Pasifik Selatan, namun berbagai inisiatif diplomatik yang dilakukan China memunculkan ketidakjelasan terhadap niat strategisnya di kawasan Pasifik Selatan.

Salah satu contoh bentuk ambiguitas adalah perjanjian kerja sama keamanan China dan Kepulauan Solomon pada tahun 2022. Meskipun isi perjanjian tersebut tidak menyebutkan pendirian pangkalan militer, namun memungkinkan bahwa perjanjian tersebut membuka pintu bagi kehadiran militer China di wilayah tersebut. (Kabutaulaka, 2022). Ketidakjelasan maksud strategis China dalam perjanjian tersebut membuat Australia sulit untuk mengukur tingkat ancaman yang pasti. Namun karena akan menimbulkan potensi dampak yang besar terhadap stabilitas kawasan, tentu kekhawatiran ini dianggap serius oleh para pembuat kebijakan Australia.

### **2.1.2 Tekanan Waktu**

Tekanan waktu bisa saja muncul dalam bentuk tenggat waktu yang pendek maupun tenggat waktu yang tidak pasti, tetapi dalam

kondisi yang mendesak sehingga memerlukan keputusan yang cepat. (Mintz & DeRouen, 2010). Dalam situasi seperti ini, para pengambilan keputusan tidak memiliki cukup waktu untuk menunggu semua informasi yang tersedia atau memikirkan seluruh dampak panjang dari setiap opsi.

Tekanan waktu ini tercermin secara nyata dalam periode menjelang penyelenggaraan pertemuan PIF ke-52 di Kepulauan Cook pada 6-10 November 2023. (Pacific Islands Forum Secretariat, 2023). Dimana pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi negara-negara Pasifik untuk menilai komitmen Australia terhadap isu perubahan iklim dan solidaritas kawasan. Setelah masa pemerintahan Scott Morrison yang banyak dikritik karena minimnya kepedulian terhadap perubahan iklim. (Daily Mail Australia, 2020). Pemerintahan baru dibawah Perdana Menteri Anthony Albanese dihadapkan pada kebutuhan untuk menunjukkan perubahan sikap secara cepat. Dalam waktu yang terbatas tersebut, Australia perlu untuk mengambil langkah yang signifikan untuk membangun kepercayaan negara-negara Pasifik Selatan yang selama ini merasa diabaikan.

Tekanan waktu semakin diperkuat oleh kondisi politik domestik Tuvalu yang akan menyelenggarakan pemilihan umum nasional pada 26 Januari 2024. (Marinaccio, 2024). Pemerintah Australia khawatir bahwa hasil pemilu dapat menghasilkan pemerintahan baru yang memungkinkan akan mengambil arah kebijakan luar negeri yang berbeda, termasuk kemungkinan menjalin hubungan diplomatik dengan China. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, karena negara-negara Pasifik Selatan seperti Kiribati dan Kepulauan Solomon telah menjalin kerja sama erat dengan China. (Kekea, 2024). Dalam kondisi inilah, Australia merasa tidak memiliki cukup waktu untuk menunggu proses diplomatik yang panjang.

Sebagai respons, Australia memilih bertindak cepat dengan menawarkan satu paket kerja sama strategis dalam bentuk Perjanjian Falepili, yang mencakup bantuan iklim, skema visa migrasi, dan klausul pertahanan. Langkah ini menunjukkan bahwa Australia tidak

hanya mengejar Solusi jangka pendek, namun juga berupaya untuk mengamankan pengaruh strategis jangka panjang di kawasan Pasifik Selatan.

### **2.1.3 Risiko**

Risiko dalam konteks ini merujuk pada kemungkinan terjadinya hasil yang merugikan dari suatu tindakan serta sejauh mana seorang aktor bersedia dalam menerima ketidakpastian dalam proses pengambilan Keputusan. (Mintz & DeRouen, 2010). Dalam Perjanjian Falepili, Australia mempersepsikan meningkatnya pengaruh China di Pasifik Selatan, khususnya setelah kerja sama pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh China dengan Kepulauan Solomon pada tahun 2022 sebagai ancaman langsung terhadap posisi strategisnya. Risiko kehilangan mitra tradisionalnya seperti Tuvalu memunculkan kekhawatiran terjadinya pergeseran keseimbangan kekuatan di kawasan.

Selain risiko strategis, Australia juga menghadapi risiko reputasional akibat beberapa kebijakan dalam klausul dalam perjanjian. Salah satunya adalah Pasal 4 ayat 4 yang menyatakan bahwa Tuvalu harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Australia sebelum menjalin kerja sama keamanan atau pertahanan dengan negara ketiga. Meskipun klausul ini dimaksudkan untuk membangun transparansi dan menjaga stabilitas, namun klausul ini dapat dipersepsikan sebagai pembatasan atas kedaulatan Tuvalu. Dengan demikian, Australia harus menyeimbangkan antara kepentingan nasionalnya dengan sensitivitas diplomatik dan prinsip solidaritas kawasan.

## **2.2 Faktor Internasional**

Faktor internasional memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Faktor ini mencakup berbagai elemen eskternal seperti perlombaan senjata, strategi penangkalan (*deterrence*), jenis rezim musuh (*regime type of adversary*), kejutan strategis, dan pembentukan aliansi. Elemen-elemen tersebut

dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. (Mintz & DeRouen, 2010).

Dalam kasus Perjanjian Falepili antara Australia dan Tuvalu, faktor internasional menjadi determinan yang paling menonjol dalam mendorong Australia mengambil langkah kebijakan Perjanjian Falepili. Ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Pasifik Selatan, terutama akibat peningkatan China telah menciptakan ketidakpastian regional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran strategis yang memicu Australia untuk merespons dalam bentuk kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan pengaruh dan menahan masuknya kekuatan eksternal ke dalam ruang lingkup strategisnya.

### **2.2.1 Deterrence**

Dalam kerangka neorealisme, negara akan bertindak rasional dalam sistem internasional yang anarkis untuk menjamin keamanan mereka sendiri. Hal ini melahirkan kompetensi kekuatan, aliansi, dan *balancing*. Waltz juga menekankan pentingnya *deterrence* sebagai mekanisme mencegah negara lain melakukan tindakan agresif. (N.Waltz, 1979) *Deterrence* tidak hanya bersifat militer, namun juga psikologis yaitu bagaimana sebuah negara membentuk persepsi bahwa ia siap dan mampu membalas jika diserang, sehingga lawan tidak mau melakukan tindakan ofensif. (Mintz & DeRouen, 2010).

Australia memanfaatkan mekanisme *deterrence* untuk merespons meningkatnya kehadiran China di kawasan Pasifik Selatan, khususnya setelah China menjalin hubungan kerja sama pertahanan yang dilakukan dengan Kepulauan Solomon pada tahun 2022. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahkan dilihat sebagai ancaman terhadap pengaruh tradisional Australia.

Perjanjian Falepili dapat dibaca sebagai bentuk *deterrence* Australia terhadap ekspansi China, khususnya melalui klausul konsultasi keamanan dalam Pasal 4. Dimana Pasal 4 tersebut menyebutkan Tuvalu memiliki kewajiban untuk melakukan konsultasi dengan Australia sebelum menjalin hubungan kerja sama keamanan dan pertahanan dengan negara ketiga. (Australia). Dengan klausul ini,

Australia memberi sinyal kuat bahwa ia akan melindungi wilayah mitranya dan tidak akan pasif jika negara ketiga dalam hal ini China, yang berusaha ingin membangun kerja sama pertahanan di wilayah tersebut, sekaligus membatasi kekuatan eksternal menjalin hubungan dengan Tuvalu.

Jenis penangkalan yang dilakukan Australia ini dapat dipahami sebagai bentuk dari *extended immediate deterrence*, yaitu ketika suatu negara memperluas keamanannya kepada negara kecil yang berada dalam posisi rawan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mintz dan DeRouen, *extended deterrence* akan efektif ketika negara pelindung menunjukkan komitmennya terhadap negara yang akan dilindungi dengan segala cara. (Mintz & DeRouen, 2010). Dalam hal ini, Australia menunjukkan keseriusan komitmennya dengan memasukan komponen pertahanannya secara eksplisit ke dalam perjanjian bilateralnya.

### **2.2.2 Alliances**

Dalam teori Mintz, pembentukan aliansi merupakan cara untuk mengurangi ketidakpastian dan mencegah konflik melalui keseimbangan kekuatan (*balance of power*). Aliansi juga berfungsi sebagai sinyal komitmen terhadap sekutu dan sekaligus sebagai bentuk isolasi terhadap aktor eksternal yang dianggap mengganggu keseimbangan. (Mintz & DeRouen, 2010).

Dalam konteks Perjanjian Falepili antara Australia dan Tuvalu, aliansi ini bukan hanya sekedar berbentuk kerja sama teknis yang biasa, melainkan mencerminkan bentuk aliansi strategis yang mengikat kedua negara dalam bentuk komitmen jangka panjang dalam bidang perubahan iklim, migrasi dan pertahanan. Bahkan, ketentuan dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa Tuvalu memiliki kewajiban untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Australia sebelum menjalin kerja sama pertahanan atau keamanan dengan negara ketiga, dapat dibaca sebagai indikator terbentuknya aliansi bilateral yang bersifat eksklusif.

Dalam kerangka neorealisme, pembentukan aliansi seperti ini merupakan respons terhadap sistem internasional yang anarki,

dimana negara-negara bertindak untuk mempertahankan keamanan dan posisi kekuatannya. Australia memafaatkan aliansinya dengan Tuvalu sebagai bagian dari strategi *balancing* terhadap pengaruh China. Hal ini menunjukkan bahwa aliansi dalam sistem anarki bukanlah hasil solidaritas, melainkan kepentingan strategis.

### **2.2.3 Regime Type of Adversary**

Mintz dan DeRouen menjelaskan bahwa negara demokratis tidak akan berperang melawan negara demokratis lainnya, dan cenderung menyelesaikan konflik secara damai. Sedangkan negara non-demokrasi mereka sering dianggap lebih agresif dan tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, tipe rezim negara lain biasanya dianggap dapat menentukan seberapa besar ancaman yang dapat dirasakan, dan hal tersebut ini dapat membentuk arah kebijakan luar negeri. (Mintz & DeRouen, 2010).

Dalam konteks Australia, China dipersepsikan sebagai kekuatan otoriter yang ambisius di kawasan Pasifik Selatan. Meskipun tidak secara eskplisit mengancam Australia secara militer, namun struktur pemerintahan China yang otoriter dapat dianggap menciptakan ketidakpastian tinggi terkait tujuan strategisnya. Hal ini berbeda dengan negara demokrasi seperti Australia, Dimana mekanisme transparansi dan kontrol institusional seperti parlemen, media dan opini publik dapat membatasi tindakan agresif pemerintah. (Mintz & DeRouen, 2010).

Karena itu, tipe rezim lawan sering kali langsung dikaitkan dengan tingkat ancaman tertentu yang pada akhirnya memengaruhi arah keputusan kebijakan luar negeri. Sebagai negara demokratis, Australia cenderung membentuk aliansi dan memperkuat keterikatan dengan negara demokrasi kecil seperti Tuvalu. Penandatanganan Perjanjian Falepili mencerminkan upaya Australia untuk melindungi tatanan regional yang terbuka dan berbasis aturan, serta dapat mencegah Tuvalu agar tidak mendekat ke kekuatan otoriter seperti China.

## **2.3 Faktor Domestik**

Dalam kerangka Foreign Policy Decision Making (FPDM) menurut Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr., faktor domestik merupakan elemen penting dalam membentuk proses perumusan kebijakan luar negeri. Faktor ini mencakup tekanan politik dalam negeri, kondisi ekonomi, serta opini publik. Dalam konteks negara demokratis seperti Australia, dinamika politik domestik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap legitimasi dan arah kebijakan luar negeri. (Mintz & DeRouen, 2010).

### **2.3.1 Opini Publik**

Opini publik merupakan salah satu faktor domestik penting yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, terutama dalam sistem politik demokratis. Dalam sistem demokrasi, opini publik dapat menjadi tekanan politik signifikan yang dapat mendorong atau membatasi kebijakan luar negeri. Bahkan keputusan penting seperti menggunakan kekuatan militer atau pembentukan aliansi luar negeri sering kali dipengaruhi oleh persepsi publik tentang sejauh mana masyarakat melihat isu tersebut sebagai yang mendesak untuk ditangani oleh pemerintah. (Mintz & DeRouen, 2010).

Di Australia perubahan iklim telah menjadi isu domestik yang menimbulkan tekanan besar terhadap kebijakan luar negeri, khususnya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison. Pemerintahan Morrison kerap dikritik oleh publik karena dianggap tidak responsif terhadap krisis iklim, terutama saat kebakaran hutan besar yang melanda Australia. Kritik ini memuncak dalam bentuk unjuk rasa di kota-kota seperti Sydney dan Melbourne, dimana ribuan warga Australia menuntut tindakan nyata terhadap perubahan iklim. (Regan & Yeung, 2020) Ketidakpuasan publik ini menciptakan tekanan

publik domestik yang besar terhadap arah kebijakan nasional, termasuk kebijakan luar negeri Australia di kawasan Pasifik Selatan.

Pemerintah Albanese yang terpilih pada tahun 2022, membawa janji aksi iklim yang lebih kuat yang secara langsung merupakan respons terhadap tekanan publik tersebut. (Green Building Council Australia, 2022). Dalam dal ini, transisi pemerintahan tidak hanya sekedar perubahan kekuasaan akibat pemilu, namun respons terhadap aspirasi dari publik yang menginginkan perubahan kebijakan luar negeri.

Kritik terhadap kebijakan iklim juga tidak hanya muncul dari jalanan, namun juga dari ranah parlemen. Misalnya pada Agustus 2019 Penny Wong, yang saat itu sebagai Menteri bayangan Luar Negeri Australia, menyampaikan bahwa kurangnya aksi iklim dari pemerintahan Morrison telah merusak posisi Australia di kawasan Pasifik (Penny Wong, 2019). Pernyataan tersebut mencerminkan bagaimana aspirasi publik juga dapat dapat diterjemahkan menjadi kritik politik formal terhadap kebijakan luar negeri.

### **2.3.2 Electoral Cycles**

Selain opini publik, siklus pemilu (*electoral cycles*) juga menjadi faktor domestik yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri menurut pendekatan FPDM. Mintz dan DeRouen Jr., menjelaskan jika dalam sistem demokratis, pemilu sering kali menciptakan tekanan politik tambahan bagi para pengambil kebijakan, karena mereka harus merespons isu-isu penting yang mendapat perhatian publik untuk mendapatkan dukungan. (Mintz & DeRouen, 2010).

Perubahan pemerintahan pada tahun 2022 dari Perdana Menteri Scott Morrison ke Anthony Albanese menjadi titik balik yang penting dalam merespons tekanan tersebut. Pemerintahan Albanese dari Partai Butuh membawa agenda aksi iklim yang lebih maju dalam isu perubahan iklim dan berkomitmen untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara Pasifik yang sebelumnya sempat merenggang akibat kebijakan iklim oleh pemerintahan sebelumnya. (Savage, 2022).

Dalam hal ini, transisi kepemimpinan tidak hanya mencerminkan perubahan karena pemilu, namun juga karena adanya tekanan dari rakyat yang membuat arah kebijakan luar negeri ikut berubah.

Kemenangan Partai Buruh di bawah Albanese juga mencerminkan pergeseran arah dukungan publik, Dimana isu perubahan iklim menjadi lebih menonjol dalam kampanye politik. Pemerintahan baru menggunakan dukungan rakyat untuk mengubah pendekatan kebijakan luar negeri Australia di kawasan Pasifik Selatan, dengan menekankan komitmen terhadap kerja sama iklim dan solidaritas kawasan. Dalam konteks ini, Perjanjian Falepili dapat dilihat sebagai perwujudan dari arah kebijakan baru Australia pasca pemilu.

### **3. KESIMPULAN**

Setelah menganalisis tiga faktor utama dalam pendekatan *Foreign Policy Decision Making* (FPDM) yang dikembangkan oleh Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr., yaitu faktor lingkungan pengambilan keputusan, faktor internasional dan faktor domestik dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Falepili merupakan hasil dari pertimbangan kebijakan luar negeri yang kompleks dan strategis dari Australia.

Pertama, dari sisi lingkungan pengambilan keputusan, Australia menghadapi tekanan waktu dan ketidakpastian yang tinggi. Situasi ini diperparah dengan adanya ambiguitas niat strategis China terutama pasca penandatanganan perjanjian pertahanan dan keamanan China dengan Kepulauan Solomon pada 2022. Tekanan waktu menjelang pertemuan PIF ke-52 dan pemilu nasional di Tuvalu mendorong Australia mengambil keputusan cepat sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi pergeseran posisi. Perjanjian Falepili kemudian hadir sebagai respons terhadap situasi yang ambigu dan berisiko tinggi, Dimana Australia merumuskan langkah ditengah waktu yang terbatas.

Kedua, dalam faktor internasional meningkatnya kehadiran diplomatik dan keamanan China di Pasifik Selatan memicu kekhawatiran bagi Australia. Dalam konteks ini, Perjanjian Falepili berfungsi sebagai instrument *extended deterrence* dan pembentukan

aliansi bilateral untuk membatasi kehadiran kekuatan *external* seperti China. Selain itu, persepsi Australia terhadap tipe rezim China yang otoriter turut memperkuat ancaman yang didasarkan. Sebagai negara demokratis, Australia cenderung membangun kemitraan dengan negara-negara yang memiliki kesamaan nilai demokrasi, termasuk Tuvalu.

Ketiga, faktor domestik turut memainkan peran penting terutama dalam meningkatnya tekanan publik terhadap isu perubahan iklim dan perubahan kepemimpinan politik domestik. Kritik terhadap kebijakan iklim pemerintah sebelumnya menjadi salah satu pemicu naiknya Partai buruh yang mengusung agenda aksi iklim. Pemerintahan baru dibawah Anthony Albanese kemudian menggunakan dukungan publik untuk merancang kebijakan luar negeri yang lebih responsif terhadap tekanan publik, termasuk melalui Perjanjian Falepili sebagai wujud nyata komitmen terhadap solidaritas kawasan dan perubahan iklim.

Dengan demikian Perjanjian Falepili mencerminkan strategi kebijakan luar negeri Australia dalam mempertahankan posisinya di kawasan Pasifik Selatan. Kebijakan ini bukan semata-mata respons terhadap satu faktor tunggal, melainkan hasil dari pertimbangan kompleks. Perjanjian ini tidak hanya menjadi bentuk solidaritas kawasan, namun juga instrumen yang digunakan Australia dalam menghadapi persaingan geopolitik yang semakin kompleks di kawasan Pasifik Selatan.

#### **REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA**

- Australia Government Defence. (2020). *2020 Defence Strategic Update*. Australia Government Defence.
- Australia, D. G. (n.d.). *Australia-Tuvalu Falepili Union*.
- Barrett, J., & Menon, P. (2021). *Pacific Island Nations turn on Beijing-Backed AIB as Pandemic Sinks Economies*. Reuters .
- Curtain, R., & Dornan, M. (2019). *Climate change and migration in Kiribati, Tuvalu and Nauru*. Devpolicy.

- Daily Mail Australia. (2020). *Protest calls for Australian prime minister Scott Morrison to be sacked over a 'lack of action' on climate change as out-of-control bushfires burn*. Daily Briefing.
- Dziedzic, S. (2024). *Despite Beijing's attempts to 'lure' more support in the Pacific, Taiwan's top diplomat in Australia backs ties with Tuvalu*. ABC News.
- Editorial, F. A. (2022). *The new geopolitics of the Pacific Island nations*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Green Building Council Australia. (2022). *Albanese Government brings promise of stronger climate action*. Green Building Council Australia.
- Green, A., & Guilfoyle, D. (2024). *The Australia-Tuvalu Falepili Union Treaty: Statehood and Security in the Face of Anthropogenic Climate Change*. *American Journal of International Law*.
- Haq, M. N., & Islam, M. S. (2020). *Australia Sebagai Kekuatan Regional dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam di Kawasan Pasifik*. *Indonesian Journal of International Relations*.
- Kabutaulaka, T. (2022). *China-Solomon Islands Security Agreement and Competition for Influence in Oceania*. Qatar: Georgetown University.
- Kekea, G. (2024). *The Solomon Islands-China Relationship: 5 Years On*. The Diplomat.
- Lyons, K. (2019). *Fiji PM accuses Scott Morrison of 'insulting' and alienating Pacific leaders*. The Guardian.
- Maclellan, N. (2014). *Abbott's first year: Nowhere to be seen in the Pacific*. Low Institute.
- Marinaccio, J. (2024). *Tuvalu's 2024 general election: a new political landscape*. Devpolicy Blog.
- Mintz, A., & DeRouen, K. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. New York: Cambridge University Press.
- Moore, L. (2024). *A dysfunctional family: Australia's relationship with Pacific Island states and climate change*. *Australian Journal of International Affairs*.
- N.Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. McGraw-Hill.

- Nadjiha, S. (2020). Persaingan China-Australia Dalam Perebutan Pengaruh di Kawasan Pasifik. *Jurnal Asia Pacific Studies*.
- Pacific Islands Forum Secretariat. (2023). *10 November 2023 Forum Communique*. Pacific Islands Forum Secretariat.
- Penny Wong. (2019). *Pacific Leaders Call Out Coalition's Climate Inaction*.
- Poiohia, B., Moerman, L., & Perkiss, S. (2022). Pacific Step-Up: Exploring Geopolitical Accountability for Aid in Solomon Islands. *Social and Environmental Accountability Journal*.
- Regan, H., & Yeung, J. (2020). *Tens of thousands protest Australian PM's climate policies amid bushfire crisis*. CNN World.
- Savage, J. (2022). *A clear rejection of laggard climate policies*. BBC.
- Tyler, M. C. (2022). *Foreign policy and the Albanese government's first 100 days*. The Conversation.
- Wallis, J. (2023). The enclosure and exclusion of Australia's 'Pacific family'. *Political Geography*.
- Wallis, J., McNeill, H., Batley, J., & Powles, A. (2023). Security cooperation in the Pacific Islands: architecture, complex, community, or something else? *International Relations of the-Asia-Pacific*.